

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan inklusif merupakan strategi untuk memberikan pendidikan berkualitas yang dapat menjangkau seluruh peserta didik (Dreyer, 2017). Berkualitas yang dimaksud artinya layanan pendidikan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan setiap anak. Kustawan (2012) menjelaskan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menghargai perbedaan anak dengan memberikan layanan kepada setiap anak sesuai kebutuhannya dan tidak diskriminatif sehingga anak dapat belajar bersama-sama baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Hal ini terbukti dari hasil penelitian Hijriati (2017) melalui pendidikan inklusif menunjukkan perkembangan anak mengalami perubahan secara optimal karena dapat memberikan layanan pendidikan sesuai kebutuhan anak. Hasil penelitian lain juga membuktikan manfaat pendidikan inklusif bagi anak dapat menstimulus perkembangannya dan meningkatkan keterampilan sosial anak seperti, saling membantu dan bermain bersama dengan ABK, anak dapat mengenal dan menghargai perbedaan, memiliki rasa tanggung jawab dan rasa percaya diri yang berdampak pada penurunan masalah perilaku sosial antara anak (Dewi, 2017; Robbins, et al., 2019).

Berdasarkan hal tersebut perlu memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi anak berkebutuhan khusus sejak dini agar dapat memberikan pengalaman dan pembelajaran mencakup seluruh potensi anak (DEC/NAEYC, 2009). Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan inklusif seharusnya mulai diberikan dari jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), karena semua anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh layanan pendidikan yang sama dengan teman sebayanya dan memenuhi kebutuhan mereka melalui lingkungan belajar yang memberikan kesempatan pada anak untuk berpartisipasi penuh bersama dengan teman sebaya tanpa memandang perbedaan yang dialami dan pembelajaran yang diberikan juga disesuaikan dengan kebutuhan anak (Sunardi, dkk., 2011; Hebbeler, et.al., 2012; Akrim & Harfiani, 2019)

Berdasarkan data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 ABK memiliki jumlah angka mencapai 1,6 juta anak, dengan 342.720 atau sekitar 21,42% anak diantaranya ABK usia dini. Hal ini menjadi faktor penting pada penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk dapat menjangkau seluruh ABK memperoleh pendidikan sesuai kebutuhannya, khususnya bagi ABK dini. Namun, penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia berdasarkan hasil data dapodik tahun 2019 baru sebanyak 29.317 atau sekitar 11% dari jumlah sekolah di Indonesia yang telah menyelenggarakan sekolah inklusif mulai dari SD, SMP, SMA, dan SMK. Sementara untuk pendidikan inklusif jenjang anak usia dini belum ada data terhitung sampai saat ini. Sejalan dengan hal ini di Bandung, kepala seksi PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Kinkin Kornelia menyampaikan bahwa untuk sekolah inklusif binaan pemerintah provinsi sekitar 70 unit, sementara sekolah yang menjadi *piloting* inklusif hanya 9 sekolah. Saat ini ada 1.874 PAUD yang tercatat di daerah Bandung dengan 5.499 tenaga pendidik, namun sekolah inklusif tidak sampai 10 persennya. Sehingga untuk penyelenggaraan PAUD inklusif masih harus dikembangkan lebih lanjut agar dapat menjangkau ABK usia dini (Mildana, 2019).

Penyelenggaraan pendidikan inklusif saat ini pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait penyelenggaraannya. Berdasarkan pedoman penyelenggaraan PAUD inklusif yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD terkait tenaga pendidik mengharuskan setiap lembaga PAUD inklusif harus memiliki guru pembimbing khusus (GPK) dan para guru memiliki pemahaman tentang ABK, serta memiliki kemampuan dasar tentang cara memberikan layanan pendidikan kepada ABK. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 70 Tahun 2009 bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban menyediakan paling sedikit 1 orang GPK pada satuan penyelenggara pendidikan inklusif yang ditunjuk oleh pemerintah, serta berhak membantu dan menyediakan tenaga pembimbing khusus bagi satuan pendidikan inklusif yang membutuhkan sesuai kewenangannya. Pemerintah setempat berhak membantu meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di bidang pendidikan khusus bagi satuan

penyelenggara pendidikan inklusif. Selain itu, bagi lembaga penyelenggara pendidikan inklusif diharuskan untuk mempunyai komitmen terhadap pendidikan inklusif, dapat menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, penyelenggara harus mengembangkan program pembelajaran individual (PPI) bagi ABK (Anggriana & Trisnani, 2016).

Penelitian oleh Wirantho & Farah (2017) menunjukkan bahwa banyak lembaga PAUD yang telah memberikan layanan pendidikan bagi ABK tidak memiliki guru pembimbing khusus (GPK) dan tenaga ahli, serta mayoritas tenaga pendidiknya tidak berlatar belakang pendidikan khusus. Hal lain menyebabkan pengetahuan dan kemampuan guru dalam menemukenali dan memberikan intervensi dini bagi ABK mengalami permasalahan, sehingga penanganan dan pelayanan yang diberikan masih bersifat umum (Mahabbati, dkk., 2017). Demikian juga terkait pembelajaran, masih banyak guru yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan program pembelajaran individual (PPI) bagi ABK (Badiah, dkk., 2020). Kendala lain yang dialami guru adalah kurangnya kesiapan guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus untuk menerima ABK di kelas. Hal ini terbukti dari hasil penelitian terhadap guru di Hongkong tidak setuju dan belum siap menghadapi ABK karena belum memiliki kemampuan dalam menangani ABK dan merasa menjadi beban tambahan bagi profesinya (Lee, et al, 2015).

Beberapa kendala di atas menjadi salah satu penyebab masih rendahnya keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada anak usia dini. permasalahan ini terjadi selain karena latar belakang belum sesuai juga kurangnya penataran atau pelatihan yang diterima guru reguler tentang pendidikan inklusif (Fernandes, 2018), kurangnya pelatihan yang diberikan untuk membekali GPK dalam pelaksanaan pendidikan inklusif (Fajrillah, dkk., 2018), kurangnya pelatihan yang diberikan dalam hal aspek pedagogis dan psikologis tentang anak berkebutuhan khusus dan pendidikan inklusif (Aroma, 2017), dan pelaksanaan program pengembangan profesional yang diberikan tidak memadai untuk mendukung pengembangan kompetensi guru (Rajovic & Jovanovic, 2013).

Beberapa kendala inilah yang menyebabkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi tidak efektif. Karena ketika guru tidak dibekali dengan baik untuk menghadapi anak berkebutuhan khusus mereka akan memiliki sikap negatif terhadap pendidikan inklusif, sehingga pemberian layanan pendidikan bagi setiap anak tidak dapat terpenuhi sesuai kebutuhannya (Forlin, 2010).

Permasalahan dalam hal tenaga pendidik ini dapat diberikan beberapa upaya dalam mengatasinya melalui kegiatan yang dapat mengembangkan kompetensi guru. Hal ini sesuai dengan pendapat Ikbal (2018) bahwa pengembangan kompetensi guru yang dirancang secara sistematis memberikan dampak baik kepada guru untuk menjalankan tugasnya memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada anak di lingkungan pendidikan inklusif. Seperti hasil penelitian Mahabbati, dkk (2017) bahwa pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan guru dalam mengenali ABK mengalami peningkatan melalui pelaksanaan program pelatihan dan workshop meningkatkan kemampuan guru terhadap intervensi dini pada ABK usia dini. Hasil temuan Widyawati & Asih (2018) menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan pendampingan psikologi ABK dapat meningkatkan pemahaman pengelolaan kelas inklusif bagi guru PAUD. Ada pula penelitian Badiah, dkk (2020) memberikan pelatihan penyusunan program pembelajaran individual (PPI) di PAUD Permata Bunda yang memberikan hasil meningkatkan pemahaman guru pada pelaksanaan dalam menyusun PPI bagi ABK.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menjadi tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang pengembangan kompetensi guru PAUD inklusif. Dalam hal ini peneliti memilih lokasi penelitian di PG-TK Islam Ibnu Sina Kabupaten Bandung yang merupakan salah satu PAUD penyelenggara pendidikan inklusif sejak tahun 2006. Saat ini PG-TK Islam Ibnu Sina Kabupaten Bandung menjadi *resource-center* sejak tahun 2017 yang diberikan oleh pihak dinas pendidikan Kabupaten Bandung untuk membantu pengembangan sekolah inklusi lainnya yang berada di Kabupaten Bandung melalui Ibnu Sina Stimulation Center (ISSC). PG-TK Ibnu

Sina sudah menjadi sekolah percontohan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif yang diberikan oleh P4TK TKPLB. Dengan demikian, peneliti pun tertarik mengangkat judul best practice pengembangan kompetensi guru PAUD inklusif, selain dikarenakan berprestasi lokasi penelitian juga dikarenakan hasil penelitian terdahulu terkait best practice yang telah dilakukan dalam lingkup PAUD masih sebatas terkait best practice manajemen keunggulan di TK (Salam, 2017), best practice program pengelolaan ABK di TK inklusi (Alifah, Romadona, & Mariyana, 2017), dan best practice pendidikan musik bagi anak usia dini (Flohr, 2010), best practice pembelajaran sentra berkebun di PAUD (Sriyanti & Zanki, 2021), sementara best practice terkait pengembangan guru hanya terkait best practice pengembangan guru profesional secara umum (Desimone & Garet, 2015). Hal inilah yang menyebabkan peneliti tertarik untuk melihat dan mengkaji secara lebih mendalam tentang best practice pengembangan kompetensi guru di PAUD inklusif (*studi kasus di PG-TK Islam Ibnu Sina Kabupaten Bandung*).

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana perencanaan pengembangan kompetensi guru di PG-TK Islam Ibnu Sina Kabupaten Bandung
- b. Bagaimana pelaksanaan pengembangan kompetensi guru di PG-TK Islam Ibnu Sina Kabupaten Bandung?
- c. Bagaimana evaluasi pengembangan kompetensi guru di PG-TK Islam Ibnu Sina Kabupaten Bandung?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perencanaan pengembangan kompetensi guru di PG-TK Islam Ibnu Sina Kabupaten Bandung

- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan kompetensi guru di PG-TK Islam Ibnu Sina Kabupaten Bandung.
- c. Untuk mengetahui evaluasi pengembangan kompetensi guru di PG-TK Islam Ibnu Sina Kabupaten Bandung.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat peneliti secara teoritis :

1. Memberikan informasi dan pengetahuan terkait best practice pengembangan kompetensi guru PAUD inklusif.
2. Menambah wawasan keilmuan tentang pengembangan kompetensi guru PAUD inklusif sebagai salah satu bidang kajian dalam ilmu pendidikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Manfaat praktis penelitian ini adalah :

a. Bagi Guru

Penelitian ini dapat menambah wawasan guru untuk mengembangkan kompetensi dalam memberikan layanan pendidikan bagi anak pada PAUD inklusif

b. Bagi Lembaga PAUD

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi lembaga PAUD inklusif untuk pengembangan kompetensi guru.

#### **1.5 Struktur Organisasi Penulisan Tesis**

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka menggunakan sistematika penulisan dalam penelitian meliputi: Bab I berisi tentang latar belakang masalah yang dikaji terkait pendidikan inklusif dan kompetensi guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus, kemudian berisi tentang rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta struktur organisasi penulisan. Bab II berisi tentang kajian teori dalam penelitian ini terdiri dari teori terkait sejarah pendidikan inklusif, definisi pendidikan inklusif, manfaat pendidikan inklusif, pentingnya pendidikan inklusif pada PAUD, kompetensi guru PAUD

inklusif, konsep pengembangan kompetensi guru PAUD inklusif, pengembangan kompetensi guru PAUD inklusif, perencanaan pengembangan kompetensi guru, pelaksanaan pengembangan kompetensi guru, dan evaluasi pengembangan kompetensi guru. Bab III berisikan desain penelitian, tempat penelitian dan partisipan, pembatasan istilah, pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, isu etik dalam penelitian, dan refleksi dalam penelitian. Bab IV berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang perencanaan pengembangan kompetensi guru PG-TK Islam Ibnu Sina, pelaksanaan pengembangan kompetensi guru PG-TK Islam Ibnu Sina dan evaluasi pengembangan kompetensi guru PG-TK Islam Ibnu Sina. Bab V berisikan kesimpulan, implikasi dan rekomendasi yang diberikan peneliti kepada pihak terkait.